

ANALISIS KEGIATAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Inra Roiko Sihite¹, Ramayanti Damanik², Elsaria Damanik³, Fiktor N. Waruwu⁴, Jonson
Rajagukguk⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP
Nommensen Medan

Email: inrarokosihite@gmail.com¹, ramayantidamanik5@gmail.com²,
elsariadamanik8@gmail.com³, fiktornwaruwu@gmail.com⁴, jonson.rajagukguk@uhn.ac.id⁵

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the activities of the Bureau of Government and Regional Autonomy in supporting governance in North Sumatra Province. The study used a qualitative descriptive approach, utilizing firsthand experience during an internship at the Bureau of Government and Regional Autonomy, North Sumatra Governor's Office. The results indicate that the bureau has implemented the principles of good governance, particularly in terms of accountability and effectiveness of public services, although there are still shortcomings in transparency and public participation. Improving human resource capacity and utilizing information technology are strategic steps in strengthening governance in the region.

Keywords: *Bureaucracy, Good Governance, Governance, Regional Autonomy.*

ABSTRAK

Laporan magang yang telah dibuat dalam bentuk sistematika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan pengalaman langsung selama pelaksanaan magang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kantor Gubernur Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biro telah menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam hal akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipasi publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

Kata kunci: Birokrasi, Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, dan siap berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui kegiatan magang yang memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa di dunia kerja nyata. Dalam konteks Program Studi Administrasi Publik, magang di instansi pemerintahan menjadi kesempatan strategis untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di lapangan.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran sentral dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan serta pengembangan otonomi daerah. Biro ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini berfokus pada analisis kegiatan Biro Pemotda dalam mendukung penerapan prinsip *good governance*, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kantor Gubernur

Sumatera Utara pada bulan Agustus 2025. Selain observasi, dilakukan pula wawancara informal dengan pegawai biro serta analisis dokumen administratif yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas birokrasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah sejauh mana penerapan prinsip *good governance* berlangsung dalam aktivitas biro, mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mencerminkan penerapan prinsip *good governance*. Aspek transparansi terlihat dari penyediaan informasi publik melalui situs resmi pemerintah dan papan informasi kegiatan. Namun, masih terdapat kendala dalam pemerataan akses informasi, terutama di wilayah dengan keterbatasan teknologi. Akuntabilitas biro juga telah ditingkatkan melalui mekanisme pelaporan kinerja dan audit internal yang dilakukan secara berkala.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan daerah masih tergolong rendah. Meskipun telah disediakan kanal aspirasi dan forum konsultasi publik, partisipasi masyarakat belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Sementara itu, efektivitas birokrasi ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang tertib, seperti pengelolaan surat masuk dan keluar, pembuatan laporan keuangan,

serta pelaksanaan rapat koordinasi lintas bidang.

Biro Pemotda juga telah mulai mengadopsi sistem digital seperti E-Kinerja untuk memantau produktivitas aparatur sipil negara. Langkah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital birokrasi, meskipun tantangan seperti resistensi pegawai terhadap perubahan dan keterbatasan sarana teknologi masih harus diatasi. Kegiatan magang memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori administrasi publik diterapkan dalam praktik, termasuk pentingnya sinergi antara kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam hal akuntabilitas dan efektivitas kerja. Namun demikian, aspek transparansi informasi publik dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka dan inklusif. Disarankan agar biro meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, memperluas saluran komunikasi publik, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur agar mampu beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi pemerintahan.

Selain itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan internal untuk memastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat menjadi contoh

praktik birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Neneng Siti Maryam (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI No. 1.
- Andi Ni'mah Sulfiani (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services in the City of Palopo*. Jurnal Administrasi Publik. Volume XVII (1).
- Akadun Staf Pengajar STIA Sebelas April Sumedang (2007). Sosiohumaniora, GOOD GOVERNANCE. Vol. 9, No. 1,
- Abd. Rohman. Yayang Santrian Hanafi. Willy Tri Hardianto (2019) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. REFORMASI. Volume 9 Nomor 2
- Ni Putu Tirka Widanti (2022) Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.
- Khairudin Soewito Aminah (2021). POTRET KEPERCAYAAN PUBLIK, GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT DI

- INDONESIA. CV Amerta Media.
- Hasriani (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Journal Of Social Science and Politics*.
- Ipan Nurhidayat (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*. Volume 1 Nomor 1.
- Fauza adriyadi (2019). GOOD GOVERNANCE AND GOVERNMENT LENTERA. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Volume 1, Nomor 2.